

PERAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

Martinus Syamsudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl.Y.C.Oevang Oeray Sintang No.92 Sintang, Indonesia, *email: martinussyamsudin1974@gmail.com*

Abstract: *The study in this study is the Role of the National Integration Forum of the National Unity and Politics Agency of Sintang Regency. and therefore the objectives to be achieved in this study are to find out, describe and analyze. With this research method using Descriptive research. The subjects in namely the Members, with the research techniques used in data collection are observation, interviews and documentation studies with data analysis using qualitative descriptive analysis methods. The results of this study indicate that (1). The role of the FPK has carried out its role in supporting existing policies and trying to comply with all applicable provisions regarding the implementation of programs in the field of Ideology and National Insight Development. (2). FPK development is running well but after the Covid-19 pandemic there is a budget problem in implementing the national insight program because the budget for implementing the national insight program is diverted to handling Covid-19 so that several programs have not run optimally. The suggestions submitted by the Research are (1). The role of FPK which has carried out its role in supporting existing policies and has attempted to comply with all applicable provisions regarding the implementation of programs in the field of Ideology and National Insight Development so that it continues to be improved. (2). FPK development which has been running well but has not yet run optimally so that it can be improved and continue to improve the work program.*

Keywords: *Role; National Reform Forum; Kesbangpol.*

Abstrak: Kajian dalam penelitian ini adalah Peran Forum Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. dan oleh karenanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis. Dengan metode penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Subjek dalam yakni Kepala Badan, Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa, Ketua FPK dan Anggota FPK, dengan Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Peranan FPK telah menjalankan perannya mendukung kebijakan yang ada serta berupaya mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan program di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. (2). Pembinaan FPK berjalan dengan baik namun setelah pandemi covid-19 terdapat masalah anggaran dalam penyelenggaraan program wawasan kebangsaan karena anggaran untuk pelaksanaan program wawasan kebangsaan dialihkan untuk penanganan covid-19 sehingga beberapa program belum berjalan dengan maksimal. Saran yang sampaikan oleh Penelitian yakni (1). Peranan FPK yang telah menjalankan perannya mendukung kebijakan yang ada serta berupaya mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan program di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan agar terus di tingkatkan. (2). Pembinaan FPK yang telah berjalan dengan baik

namun belum berjalan dengan maksimal agar dapat di tingkay dan terus melakukan perbaikan program kerja.

Kata Kunci: Peran; Forom Pembahuran Kebangsaan; Kesbangpol.

PENDAHULUAN

Perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang (Kesbangpol). Dengan didasarkan misi Kesbangpol yang salah satu poinnya menyatakan “Memperkokoh Kesadaran Kesatuan dan Persatuan Nasional, Ideologi Negara serta komitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Badan Kesbangpol mempunyai program yang dilaksanakan setiap tahun yang berkoordinasi dengan lembaga di wilayah Kabupaten Sintang.

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dibidang Kesatuan Bangsa, Politik sesuai dengan kebijakan Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan Pelaksanan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan Fasilitasi pementapan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Ketatausahaan, Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
5. Pelaksanaan pembinaan di bidang idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
6. Pengoordinasian kebijakan operanasional di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen dan keamanan, politik, bina masyarakat, penanganan konflik sosial, dan pengawasan orang asing serta lembaga asing.
7. Pemantauan perkembangan kehidupan demokrasi. H. Pengkajian mesalah strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Peningkatan kapasitas aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; J. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk oprasional kesatuan bangsa dan politik.
9. Penyelenggaraan pasilitasi dan pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan; L. Penyusunan laporan Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
10. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 11. Penyusunan analisa jabatan;
 12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
 13. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 14. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Oprasional Prosedur (SOP)dibidang kesatuan bangsa dan politik
 15. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 16. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 17. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
 18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mempunyai Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera, Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Pada Tahun 2026” serta Misi dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang adalah (1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal; (2) Melaksanakan pembangunan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat; (3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah; (4) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial; dan (6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2014 tentang SOTK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang bahwa bidang pelayanan Tugas Kesatuan Bangsa yakni (1) Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang secara umum memiliki tugas menjaring aspirasi masyarakat dan melakukan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; (2) Adapun komposisi FPK meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Kabupaten Sintang; (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi keberadaan FPK dalam bentuk penyediaan anggaran, pelayanan sekretariat dan penyediaan prasarana yang mendukung tugas forum dimaksud. Berdasarkan

Keputusan Bupati Sintang Nomor: 220/213/KEP-KESBANGPOL/2018 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sintang. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut bahwa keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten merupakan perwakilan dari berbagai etnis yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sintang yang berjumlah 21 Orang. Oleh karena itu untuk keberlangsungan dan membangun kebersama rasa kebangsaan maka perlu mendapatkan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan

Masa depan harapan bangsa ada ditangan generasi muda, sebagaimana kelangsungan hidup bangsa dan negara yang ditentukan oleh generasi muda yang berkualitas. Perbedaan pandangan dan pemahaman pada perspekif kehidupan bangsa dan negara oleh generasi muda saat ini dengan generasi sebelumnya disebabkan pada keadaan dan kondisi yang berbeda jauh dalam hal memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. generasi muda saat ini tidak terlibat langsung pada perjuangan bangsa merebut dan mempertahankan bangsa Indonesia sehingga wawasan kebangsaan bagi generasi muda saat ini dinilai kurang dihayati.

Wawasan kebangsaan perlu di tanamkan bagi seluruh elemen bangsa, untuk dapat saling menghargai dan memahami satu sama lain sebagai bangsa yang besar. Dalam hal ini sangat penting pelaksanaan suatu regulasi

yang dapat menyatukan jiwa patriotisme bagi bangsa Indonesia. Pelaksanaan menurut Presman dan Asron (Danim, 2017:295) mendefinisikannya sebagai berikut: Pelaksanaan mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Pelaksanaan atau penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu jaringan yang Nampak. Pelaksanaan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan yang lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan merupakan suatu kebijakan atau program dimana akibat hal tersebut akan berpengaruh, sehingga akan membawa suatu dampak terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat.

Peran Forum Pembauran Kebangsaan

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 2) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan

tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, Sarlito, (2015: 215) mengemukakan bahwa peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama .

Menurut Soekanto (2012: 212) menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

Menurut Soekanto (2012: 214) bahwa peran dapat dibagi menjadi tiga jenis., adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1) Peran Aktif.

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2) Peran Partisipatif.

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3) Peran Pasif.

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang berbeda pula. Namun demikian bahwa perbedaan itu harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia (suku bangsa) sebagai makhluk pribadi dan dalam masalah ini bersifat biasa. Namun demikian dengan adanya kesatuan asas kerohanian yang kita miliki, maka perbedaan itu harus dibina kearah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagiaan bersama. Dengan adanya kesamaan dan kesatuan asas kerohanian dan kesatuan ideologi, maka perbedaan itu perlu diarahkan pada suatu persatuan. Maka disinilah letak fungsi dan kedudukan asas kerohanian Pancasila sebagai asas kerohanian Pancasila sebagai asas persatuan, kesatuan dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam masalah ini maka membina, membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting artinya, sehingga persatuan dan

kesatuan tidak hanya bersifat statis namun harus bersifat dinamis.

Kehadiran kemajuan teknologi informasi serta komunikasi yang begitu pesat memberikan peranan yang positif terhadap perkembangan kehidupan manusia. Namun demikian tidak hanya pengaruh positif saja yang didapat di era teknologi informasi ini namun banyak sekali pengaruh negatif yang melunturkan rasa kebanggaan dan cinta pada tanah air bangsa, menurunkan akhlak dan moral, menurunkan rasa persatuan dan kesatuan dalam diri generasi muda. Sehingga pemahaman publik sangat penting untuk diklaim oleh seluruh daerah, terutama usia yang lebih muda. Jadi harus ada upaya untuk menanamkan, mengembangkan, dan mengikuti pengetahuan umum daerah setempat baik melalui pelatihan atau pengajaran lokal dan sekolah. Selanjutnya, usia yang lebih muda memiliki benteng yang kokoh untuk mengimbangi kehadiran patriotisme Indonesia.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan penghayatan nilai-nilai pada Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan baik dilaksanakan sendiri ataupun lewat program kerjasama mitra organisasi masyarakat dengan lembaga nirlaba, unsur pemerintahan maupun non pemerintahan yang melibatkan forum dialog nirlaba, aktivis masyarakat dan pemuda, dan melaksanakan pembinaan kerukunan antar umat beragama dan peningkatan kohesivitas masyarakat. Selain dari pada itu, untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan memperkuat karakter bangsa Pemerintah Pusat melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Mengingat Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Nasional. Pengetahuan publik secara sederhana adalah pandangan dan iklim negara Indonesia yang menitik beratkan pada solidaritas dan kejujuran negara dan kehormatan daerah berdasarkan UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Dalam menanggulangi persoalan yakni memudarnya semangat wawasan kebangsaan yang berdampak terjadinya disorientasi, perpecahan, konflik, dan tindakan anarki.

Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 1 ayat (4) Forum Pembauran Kebangsaan adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang dirahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka di bentuklah Forum Pembauran Kebangsaan ini yang diharapkan dapat memperkokoh integritas nasional dan

menegakkan kedaulatan di negara Indonesia yang didalamnya perlu koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait serta seluruh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, bahwa penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan ini dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Namun yang penulis pahas pada penelitian ini adalah Forum Pembauran Kebangsaan di tingkat Kota/kabupaten. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan ditingkat ini menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintahan kabupaten/kota yaitu bupati/walikota. Tugas dan kewajiban bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan pembauran kebangsaan ini adalah:

- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa didaerah;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dan berbagai ras, suku dan etnis;
- c. Mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
- d. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di

kabupaten/kota dalam pembauran kebangsaan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34 Tahun 2006 pasal 9 ayat (2), bahwa Forum Pembauran Kebangsaan di tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan;
- b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. Merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34 Tahun 2006 Selanjutnya bahwa pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan kabupaten/kota ini dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusa kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah provinsi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian. Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidik dengan menggambarkan/

melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut; Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, beberapa Anggota Forum Pembauran Kebangsaan

Alat Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan demikian penelitian harus menggunakan teknik-teknik tertentu dalam pengumpulan data, oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut;

Panduan Pengamatan/*Observasi*: yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada objek-objek dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Penelitian. 2. Pedoman Wawancara atau *interview* adalah wawancara subjek penelitian yang berhubungan dengan Penelitian. 3. Dokumentasi, yaitu mempelajari dan menggali data sekunder yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini seperti tentang gambaran Pelaksanaan Tugas Forum Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, disamping itu juga studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai macam dokumen berupa buku-buku, laporan teknis yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang berbentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 150 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Bahwa Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

adalah : a. Kepala , b. Sub Bagian Tata Usaha, c. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, d. Seksi Kewaspadaan Nasional, e. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik dalam Negeri, f. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang telah diberikan tugas untuk menjaga dan membina Ideologi Negara yaitu Pancasila. Hal ini dengan dibentuknya bidang khusus yaitu Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku mengenai program tersebut, sehingga implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejak awal. Program yang dijalankan berupa; melakukan penyusunan dokumen dan modul peningkatan pemahaman penghayatan pilar kebangsaan; melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman dan penghayatan 4 pilar kebangsaan yang diikuti Tokoh masyarakat serta kepala desa; melaksanakan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan di radio; melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, 7) melaksanakan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Disisi lain aparatur tetap mengupayakan program pembinaan wawasan kebangsaan dengan mengaktifkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Kehadiran FPK sangat dibutuhkan untuk kebutuhan NKRI yang sangat rentan terhadap

konflik. Perlu pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik. Sekecil apapun persoalan sosial harus segera terselesaikan agar tidak menjadi besar. Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI.

1. Peranan Forum Pembauran Kebangsaan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan lembaga yang bertugas menjaga dan meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, melestarikan Nilai Sosial Budaya, mengembangkan kehidupan Demokrasi serta menjalin komunikasi dan kerjasama antar kelompok Masyarakat untuk memantapkan Pembauran kebangsaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi social dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan

etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Forum Pembauran Kebangsaan adalah bagian dari proses pembudayaan bangsa yang harus dipacu kearah yang positif dan harus dijiwai dengan sikap mawas diri, tenggang rasa, kerukunan serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Kebhinekaan Ras, Suku Budaya dan Agama yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, Keanekaragaman ini merupakan ciri khas Bangsa Indonesia. Kebhinekaan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan Berbangsa dan Bernegara di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik vertikal maupun horizontal disebabkan oleh latar belakang permasalahan Ras, Suku, Budaya dan Agama yang dapat mengancam Integritas Nasional,

Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sintang Bahwa Keanggotaannya merupakan representasi suku atau etnis yang ada di Kabupaten Sintang. Keanggotaan FPK terdiri atas perwakilan suku, yakni Suku Dayak, Suku Melayu, suku Jawa, Madura, perwakilan NTT, Minang, Batak, Bali, dan Tionghoa.

Indonesia patut berbangga karena keberagaman Indonesia menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Kesadaran kondisi NKRI yang majemuk membuat setiap orang sadar dan berpikir bahwa Indonesia adalah negara kaya potensi dan mampu menjawab tantangan dan hambatan bagi keutuhan NKRI apabila dikelola dengan baik.

FPK diharapkan mampu mengambil setiap peluang yang ada dan memanfaatkannya secara baik, demi kemajuan bangsa dan mempunyai jiwa bela negara dan menjaga keharmonisan sosial. Jangan melihat perbedaan dari sisi kekurangan, tapi lihat dari sisi kelebihan dan keindahannya.

Berdasarkan dokumen yang peneliti peroleh bahwa komposisi Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.2 komposisi Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2021

No	NAMA	ETNIS/ PERWAKILAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. P.E. Chuno, M.Si	Dayak	Ketua	Aktif
2	H. Rinjani Mustafa	Melayu	Wakil Ketua	Aktif
3	H. Rukli, S.Pd	Melayu	Sekretaris	Aktif
4	Drs. Andreas Calon	Dayak	Anggota	Aktif
5	Drs. A.Tilla, M.Si	Dayak	Anggota	Aktif
6	H. Gusti Ardania., A.Ma	Melayu	Anggota	Aktif

7	H. Jamaludin Wahab	Aceh	Anggota	Aktif
8	Abraham. M. Souisia	Maluku	Anggota	Aktif
9	Praktik Hariyono,BA	Jawa	Anggota	Aktif
10	H. Sumarno	Jawa	Anggota	Aktif
11	Tomi Sumarno	Tiongha	Anggota	Aktif
12	H. Bagindo Burhanudin	Padang	Anggota	Aktif
13	Suryana, S.Pd	Sunda	Anggota	Aktif
14	H.M. Asyad, B. Sc	Bugis	Anggota	Aktif
15	Duman Simanjuntak	Batak	Anggota	Aktif
16	H. Amat	Madura	Anggota	Aktif
17	Ir. Alfon Mentang	Manado	Anggota	Aktif
18	Drs. Rafael Suban,M.So	NTT	Anggota	Aktif
19	Heryanto	Betawi	Anggota	Aktif
20	Edi Widodo, S.H	Hindu Bali	Anggota	Aktif
21	Hasan Basri	NTB	Anggota	Aktif

Sumber: Dok Badan Kesbangpol, Januari 2023

Berdasarkan Tabel bahwa Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan terdiri dari 21 orang yang terdiri dari Ketua, wakil ketua, dan sekretaris masing satu dan yang lainnya adalah anggota yang terdiri dari perwakilan suku-suku bangsa indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Sintang..

2. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan

Forum Pembauran Kebangsaan merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditujukan bagi masyarakat Kabunpten sintang. Forum Pembauran Kebangsaan ini merupakan suatu program yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan kebangsaan serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi program pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan sejauh ini berjalan dengan baik namun setelah pandemi covid-19 yang berdampak pada daerah kita, implementasi program belum dilaksanakan dengan maksimal. Perihalnya, terdapat kendala dalam pelaksanaan rutinitas fungsi pada program pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan bagi masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan program pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan yang seharusnya dilakukan kurang lebih 2 kali hanya dilakukan 1 kali dalam setahun dan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan keterbatasan anggaran dimana dana yang seharusnya digunakan untuk program pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan dialokasikan untuk penanganan covid-19 dan itupun pelaksanaan kegiatannya hanya

sebatas sosialisasi secara daring yang dinilai kurang efektif. Untuk kegiatan lain seperti lomba cipta, pentas seni, belum dapat dilaksanakan. Belum lagi adanya masalah dari segi dana yang belum mencukupi kegiatan pembinaan sehingga program-program yang dilaksanakan belum menjangkau masyarakat yang ada pedesaan apalagi di wilayah perbatasan. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan hanya dilaksanakan pada diperkotaan khususnya di Kota Sintang padahal penanaman dan penguatan karakter kebangsaan di pedesaan dan wilayah perbatasan sangat penting untuk dilakukan mengingat paham dan doktrin berbeda yang dengan mudahnya dapat masuk mengancam rasa nasionalisme masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah Pelaksanaan Tugas Forum Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan FPK telah menajalakan perannya mendukung kebijakan yang ada serta berupaya mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan program di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Pembinaan FPK berjalan dengan baik namun setelah pandemi covid-19 terdapat masalah anggaran dalam

penyelenggaran program wawasan kebangsaan karena anggaran untuk pelaksanaan program wawasan kebangsaan dialihkan untuk penanganan covid-19 sehingga beberapa program belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan Kesimpulan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah Pelaksanaan Tugas Forum Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Peranan FPK yang telah menajalakan perannya mendukung kebijakan yang ada serta berupaya mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan program di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan agar terus di tingkatkan.
2. Pembinaan FPK yang telah berjalan dengan baik namun belum berjalan dengan maksimal agar dapat di tingkatkan dan terus melakukan perbaikan program kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. 2017. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Burai Aksara
- Dwijowijoto dan Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

- Faisal, S. 2005. *Format-Format-Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007. *Akuntansi Manajerial*. Edisi ke-11. Penerbit:Salemba Empat-UI:Jakarta
- Miles M, Huberman,M. dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: Edition 3*, Arizona State University.
- Nugroho, R. 2019. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*.edisi revisi Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sarlito, S. Wirawan. 2015. *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarna. 1989. *Demensi-Demensi Prima Administrasi Negara*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono.2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tachjan,H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Wahab, A.S. 2002. *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan yang Responsif dan Berkualitas*. Malang : PPSUB
- Wibawa, S. 2005. *Studi Implementasi Kebijakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. FISIPOL. Yogyakarta : UGM.
- Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit:Media. Yogyakarta.

Undang-Undang dan Peraturan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah*
- Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pendidikan Wawasan Nasional*